

**MOTIVASI INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN VIETNAM  
DI BIDANG PERIKANAN TAHUN 2010-2012**

Oleh:

**Puji Lestari**

***Pembimbing: Afrizal, S.IP, M.A***

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract: This study used a qualitative research method that the source data is taken from books , journals , newspapers , the internet , and previous studies have data that is relevant to the title . Perspectives and levels of analysis used in this study is that the state as the main actor . By using the theory of international cooperation and analyzes the state of the nation . This study will describe the motivations that made Indonesian fisheries cooperation with Vietnam . And knowing the interests of Indonesian fisheries cooperation with Vietnam . Indonesia as a country with high potential fishery resources are threatened by illegal fishing, which often occur in the waters of Indonesia and neighboring countries especially Vietnam . So expect the cooperation that exists to prevent and reduce illegal fishing that occurs in both countries as well as the fisheries co-operation can improve Indonesia and Vietnam export fisheries and mutually beneficial cooperation between the two countries that is .***

***Keywords : Motivations, Relation Cooperation, Fisheries, Illegal Fishing, Vietnam***

## **Pendahuluan**

Sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini juga meliputi bidang perikanan dan kelautan. Potensi yang dimiliki Indonesia di sektor perikanan memang cukup menjanjikan. Luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km dan garis pantai sepanjang 81 ribu km serta gugusan pulau sebanyak 17.508, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengeksport produk perikanan yang diminati oleh banyak negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Keadaan Geografi Indonesia”. Diakses dari: <http://www.demografiIndonesia.html>. Pada tanggal 18 Juni 2010.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, dan memiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan dari 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Indonesia juga berada pada zona cincin api yaitu daerah patahan yang rawan gempa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor-Leste. Letak dan jumlah pulau di Indonesia yang begitu banyak menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya diolah dengan baik. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional.<sup>3</sup>

Dari kondisi geografi, Vietnam merupakan salah satu negara dikawasan Asia Tenggara. Vietnam merupakan negara republik yang terletak di bagian timur semenanjung Indo Cina, dengan ibukota Hanoi. Secara astronomis, Vietnam terletak ANTARA 23 LU – 29 LU dan 105 BT – 109 BT. Luas Negara Vietnam 1.650 kilometer dari utara ke selatan dan memiliki garis pantai yang sangat panjang sekitar 3000 kilometer.<sup>4</sup>

Vietnam, yang merupakan salah satu dari sepuluh eksportir terbesar produk perikanan, memiliki garis pantai yang luar biasa panjang sejauh 3.300 km dan wilayah pasang surut yang luas, yang merupakan kondisi yang baik untuk perikanan laut. Vietnam juga memiliki wilayah luas air tawar dan payau yang cocok untuk budidaya air. Perikanan lepas pantai, pantai dan air tawar, serta budidaya air seluruhnya berkontribusi pada produksi. Produk-produk lautnya meliputi ikan, udang, cumi-cumi, sotong, dan

---

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup>“Letak geografi RI-Vietnam”. Diunduh dari situs <http://www.demografi.go.id>, tanggal 29 Desember 2012

kerang-kerangan. Sektor perikanan selama beberapa waktu berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi Vietnam. Selanjutnya, ia menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 3 juta orang dan membantu mengurangi kemiskinan sembari meningkatkan keamanan pangan dan keselamatan pangan. Menghasilkan produk-produk perikanan tidak hanya sangat penting bagi konsumsi domestik namun juga sebagai ekspor. Perikanan merupakan salah satu peraih pendapatan ekspor terbesar Vietnam. Pada tahun 2010, nilai ekspor perikanan Vietnam mencapai US\$ 4,9 miliar, dan tahun 2011 mencapai US\$ 6,1 miliar. Pada tahun 2012, nilai ekspor perikanan diperkirakan tumbuh sebesar 10,6% mencapai rekor US \$ 6,8 miliar pada tahun 2012. Ekspor diharapkan mencapai lebih dari US\$ 2 miliar, sementara jenis udang mencapai lebih dari US\$ 2,5 miliar. Sembilan puluh negara mengimpor produk perikanan Vietnam, di mana AS menjadi yang terbesar, diikuti oleh UE, Jepang, Cina, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan.<sup>5</sup>

Hubungan Indonesia dengan Vietnam dimulai pada tahun 1955. Pada waktu itu, Mr. Soedibjo Wirjowerdojo adalah Konsul Jenderal Republik Indonesia yang pertama kali diangkat dan ditunjuk menempati pos perwakilan perintisan dalam level Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Vietnam yang masih berkedudukan di Hanoi. Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri mengunjungi Vietnam pada bulan Juni 2003. Pada saat ini kedua negara menandatangani "Deklarasi tentang Kerangka Kerjasama Ramah dan Komprehensif Memasuki Abad 21". Pada bulan Mei, 2005, President Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Vietnam. Pada bulan Desember tahun yang sama perayaan diselenggarakan di ibukota masing-masing untuk merayakan ulang tahun ke-50 pembentukan hubungan diplomatik.<sup>6</sup>

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis (perikanan dasar laut) dan perikanan komersial terbesar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia sepanjang 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.845 pulau memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> “pertanian-perikanan “, Dikutip dari: <http://www.informasi-vietnam.com/html>, tanggal 12 Juni 2013

<sup>6</sup> “Indonesia, Vietnam sepakati aturan kerjasama maritime” <http://m.voaindonesia.com/a/98189.html>, tanggal 13 Maret 2013

<sup>7</sup> “ Potensi-lautan-indonesia”, Diakses dari <http://www.kkp.go.id>, Tanggal 11 Juni 2013

Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan lokal dan ekspor, yang tentu saja dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan atau peranan terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia. Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan semestinya membuka lapangan kerja yang sangat luas terutama bagi putra daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>8</sup>

Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya masyarakat Indonesia yang sedikit saja menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan.

Banyaknya kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab yang akhir-akhir ini marak terjadi memberikan dampak yang cukup besar bagi negara. Kegiatan ini dikenal dengan istilah illegal fishing. Kerugian yang dialami tidak hanya dapat dihitung oleh nominal saja, tetapi juga kerugian moral atau harga diri bangsa karena hal tersebut menyangkut kedaulatan pemerintah Indonesia.

Kegiatan illegal fishing yang paling umum terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, mulai dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hingga masuk ke perairan kepulauan. Hal ini dipicu oleh batas maritim antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga yang saling berdekatan, sehingga mendorong kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di daerah yang berdekatan dengan perairan Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam industri perikanan, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai jenis ikannya. Bagaimana tidak, karena kita tidak tahu bahwa begitu banyak penangkapan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin perdagangan. Sehingga bangsa Indonesia akan menjadi miskin bila dibiarkan seperti itu terus, seharusnya kita bisa memanfaatkan industri perikanan ini dengan pengolahan ikan, pengalengan ikan dan ekspor yang sesuai dengan standar kualitas nasional dan internasional demi mendukung kelancaran industri perikanan di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam kerjasama ini kedua negara melakukan pertemuan bilateral dan Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan keinginan kerjasama di bidang perikanan

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> "Illegal fishing, kejahatan tradisonal yang terlupakan", dikutip dari: <http://www.p2sdpkpendari.com>, pada tanggal 22 Maret 2013

<sup>10</sup> "Potret-negara-maritim-indonesia-menuju-pembangunan-industri-laut" Dikutip dari <http://penanusantara.com>. 12 Maret 2013

budidaya, peningkatan investasi bidang perikanan terpadu di Indonesia, dan melakukan exchange visit tenaga ahli diantara dua kementerian. Lebih kongkret Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan Vietnam sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan perikanan budidaya khususnya patin, memberikan kesempatan kepada tenaga ahli Indonesia untuk mempelajari sistem pembudidayaan patin, dan bersama-sama menanggulangi praktek IUU Fishing serta meningkatkan kerjasama antar lembaga penelitian dan universitas di bidang kelautan dan perikanan.<sup>11</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Sumberdaya Perikanan Indonesia

Kepulauan Indonesia terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudra Pasifik dan samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia, yang menghubungkan kepentingan-kepentingan negara-negara besar dan maju, sehingga secara internasional mempunyai arti yang sangat strategis. Gugusan pulau-pulau yang terdapat di Indonesia membentuk 50 (lima puluh) selat dan 64 (enam puluh empat) teluk. Dasar perairan ini umumnya merupakan bagian yang produktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan di laut lepas menembus hingga ke dasar laut.<sup>12</sup>

Kekayaan laut tidak hanya berupa kekayaan hayati dan nabati yang ada dalam massa air laut, seperti ikan dan tumbuh-tumbuhan laut, tetapi juga bahan tambang mineral yang terkandung dalam air laut dan lapisan di dasar laut. Selain itu masi ada juga kekayaan energi listrik yang dapat ditimbulkan oleh gelombang air laut dan hembusan angin di atas laut.

Indonesia di anugerahi kekayaan laut yang cukup besar dan beraneka ragam. Sebagai negara bahari kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia, yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Sembilan WPP tersebut meliputi:<sup>13</sup>

1. Selat Melaka;
2. Laut Cina Selatan dan Laut Natuna;
3. Laut Jawa dan Selat Sunda;
4. Selat Makasar dan Laut Flores;
5. Laut Banda;

---

<sup>11</sup> Indonesia, Vietnam Sepakati Aturan Investasi dan Kerjasama Maritim”, dikutip dari: <http://m.voaindonesia.com/.html>, tanggal 20 Juni 2013

<sup>12</sup> K. Romimohtarto, “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia”, Makalah Seminar Hukum Nasional V, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1990, hlm 2-3.

<sup>13</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Rencana Strategis Pembanguna Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009, Jakarta, 2005, hlm 23.

6. Teluk Tomini dan Laut Maluku;
7. Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik;
8. Laut Arafura; dan
9. Samudera Hindia.

Dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di Indonesia lebih dari 25.000 jenis ikan. Dari potensi tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi lestari tersebut terdiri dari ikan pelagis besar dan sebesar 1,65 juta ton, ikan pelagis kecil sebesar 3,6 juta ton, ikan demersal sebesar 1,36 ton, ikan karang sebesar 1,45 juta ton, udang paneid sebesar 94,8 ribu ton, lobster sebesar 4,8 ton dan cumi-cumi 28,25 ton.<sup>14</sup>

Selain sumber daya perikanan yang terdapat di seluruh wilayah perairan Indonesia terdapat pula keanekaragaman terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di wilayah beriklim tropis, hanya di iklim tropis inilah terumbu karang dapat berkembang dengan baik. Dibanding dengan negara tropis lainnya Indonesia memiliki keunggulan alam tersendiri berupa tempat "*megabiodiversity*" bahkan termasuk paling kaya keanekaragaman hayatinya, dan tidak tertandingi oleh negara-negara maju di belahan bumi bagian utara maupun bagian selatan.

Adanya kecenderungan global mengenai perikanan makin menuju pada pemahaman bahwa sumber daya perikanan yang unik, khususnya sifat hidupnya yang dapat bermigrasi dan berbatasan kemampuan untuk pilih sehingga berpotensi akan musnahnya sumber daya ikan bila tidak dikelola secara baik. Karakteristik sumber daya ikan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatannya, baik pada perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maupun pada perairan internasional.

Banyaknya kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab yang akhir-akhir ini marak terjadi memberikan dampak yang cukup besar bagi negara. Kegiatan ini dikenal dengan Illegal Fishing. Kerugian yang di alami tidak hanya dapat di hitung oleh nominal saja, tetapi juga kerugian moral atau harga diri bangsa karena hal tersebut menyangkut kedaulatan pemerintahan Indonesia.<sup>15</sup>

Sumberdaya perikanan di Indonesia sangat berpotensi baik sumberdaya perikanan tangkap maupun budidaya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan sebagai penghasil devisa negara. Sesuai dengan sasaran yang diharapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebanyak 9,7 juta ton, nilai ekspor perikanan US\$ 5 miliar, konsumsi ikan penduduk 32,29 kg per kapita per tahun, dan menyediakan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,24 juta orang (Renstra DKP, 2009).

## **Indonesia dan Vietnam jalin kerjasama perikanan**

---

<sup>14</sup> Rokhmin Dahuri, "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan", Makalah, disampaikan pada Seminar Kuliah Umum Institut Pertanian Bogor, tanpa tahun, hlm.12.

<sup>15</sup> "Illegal Fishing, Kejahatan Tradisional yang terlupakan " <http://www.depghan.go.id>, diakses pada hari sabtu, 22 Maret 2008

Indonesia dan Vietnam akan memfokuskan kerja sama untuk menyelesaikan masalah penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan Indonesia pada tahun 2011. Selain itu, kedua belah pihak juga akan berupaya menyelesaikan kasus masih ditahannya lebih dari 100 orang nelayan Vietnam di Indonesia.

Perdagangan kedua negara yang hampir mencapai USD 3 miliar pada akhir 2010 tetap dinilai masih terlalu kecil dibandingkan potensi perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara. Untuk itu, kedua negara juga sama-sama akan memberi prioritas tinggi pada upaya meningkatkan kerja sama perdagangan pada tahun 2011 sehingga nilai perdagangan dapat ditingkatkan secara maksimal.

Dalam rangka kerja sama regional, Vietnam akan memberi dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2011. Dan Vietnam sejalan dengan pandangan Indonesia mengenai perlunya menjaga keseimbangan dinamis di kawasan.

Demikian hal-hal penting yang mengemuka pada acara Media Informal Gathering ke-4 (MIG-4) yang diselenggarakan oleh KBRI Hanoi di Hanoi. Hal-hal penting itu sejalan dengan tema acara yakni: The 55th Anniversary of Indonesia – Vietnam Diplomatic Relations: Advancing A More Robust Development.<sup>16</sup>

MIG-4 bertujuan untuk menengok kembali 55 tahun hubungan kedua negara, raihan selama 2010, dan proyeksi hubungan bilateral 2011. Acara tersebut dihadiri oleh 45 orang pimpinan media massa dan wartawan Vietnam dan menampilkan tiga orang pembicara: Duta Besar RI untuk Vietnam, Pitono Purnomo; Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Huu Chi; dan Direktur Jenderal Penangkapan dan Perlindungan Ikan, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Chu Tien Vinh.

Dubes RI dalam paparannya mengemukakan beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun 2011. Menurut Dubes, Indonesia ingin segera mengimplementasikan dua MOU yang ditandatangani saat Presiden Indonesia mengadakan kunjungan kenegaraan ke Vietnam pada Oktober 2010, yakni MOU kerja sama di bidang pertahanan dan perikanan dan memastikan mengenai jumlah nelayan Vietnam yang masih ditahan Indonesia serta mencari jalan keluar untuk memulangkan mereka dalam waktu dekat.

### **Indonesia dan Vietnam bekerjasama dalam pembudidayaan ikan patin**

---

<sup>16</sup> RI-Vietnam Fokuskan Kerjasama Perikanan dan Perdagangan, Diakses dari: [www.KemenluRI.go.id](http://www.KemenluRI.go.id), tanggal 25 Oktober 2013

Ikan dianggap memberikan peluang bisnis yang besar karena mengandung protein dan gizi yang sangat baik. Kesadaran masyarakat di hampir seluruh dunia akan pentingnya makan ikan untuk kesehatan juga semakin tumbuh. Baik yang tergolong ikan air laut maupun ikan hasil budidaya, keduanya memiliki potensi ekonomi dan kendala masing-masing. Di satu sisi, ketersediaan ikan air laut terpengaruh oleh kondisi cuaca. Di sisi lain, ketersediaan pakan yang baik merupakan tantangan tersendiri dalam mengembangkan ikan hasil budidaya. Selain ikan tuna, udang dan rumput laut, salah satu jenis ikan yang saat ini tengah dikembangkan di Indonesia dan Vietnam adalah ikan patin, yang memperlihatkan potensi ekspor cukup tinggi.<sup>17</sup>

Ikan patin merupakan ikan air tawar yang memiliki harga jual cukup tinggi. Itulah sebabnya, usaha budidaya ikan patin merupakan peluang yang menguntungkan, baik di pasar domestik maupun internasional. Ikan patin dinilai paling potensial dan dapat diandalkan untuk meningkatkan ekspor dari sektor perikanan dengan tingginya permintaan dari pasar Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Eropa Timur dan Eropa Tengah. Tahun 2009, ikan patin merupakan salah satu dari sepuluh ikan yang dikonsumsi paling banyak di AS. Kriteria penilaian terhadap sepuluh besar tersebut didasarkan pada tonase ikan yang terjual di pasaran. Menurut *National Fisheries Institute* di AS, ikan dengan daging berwarna putih dan beraroma ringan yang ada di pasaran AS merupakan ikan patin hasil budidaya di Asia. Dengan kata lain, penggunaan ikan patin dalam berbagai industri makanan di AS, menggambarkan adanya peluang yang dapat terus dimanfaatkan oleh para eksportir dan pengusaha ikan patin. Seperti halnya ikan lele, ikan patin tidak bersisik dan memiliki duri yang tajam di bagian siripnya, sehingga keduanya sama-sama digolongkan ke dalam jenis *catfish*. Namun demikian, rasa daging ikan patin lebih enak dan gurih dibandingkan dengan ikan lele. Ditambah lagi, produk ikan patin Indonesia terkenal bersih dan tidak mengeluarkan bau. Di beberapa daerah, ikan patin memiliki nama lain, seperti ikan Juara, Lancang dan Sodarim.<sup>18</sup>

Vietnam adalah negara pengeksport ikan patin terbesar di dunia karena luas lahan budi dayanya sudah mencapai lebih dari satu juta hektare. Di lain sisi, AS merupakan salah satu negara pengimpor ikan patin terbesar di dunia. Peluang ekspor ikan patin bagi Indonesia semakin terbuka lebar setelah negeri Paman Sam itu membatasi impor ikan patin yang selama ini didominasi oleh Vietnam, terutama dalam bentuk *fillet*. Impor ikan patin dari Vietnam ditutup karena disinyalir mengandung bahan berbahaya bagi tubuh manusia, berdasarkan standar kesehatan di AS. Kondisi ini merupakan peluang emas bagi pengusaha ikan patin dari Indonesia untuk mengisi kebutuhan pasar AS terhadap ikan patin yang mencapai 1,1 juta ton per tahun.

Potensi ekspor juga semakin terbuka setelah Amerika Serikat menemukan fakta bahwa ikan patin yang diimpor dari Vietnam sebenarnya berasal dari Indonesia,

---

<sup>17</sup> Kementrian Perdagangan, Warta Ekspor, edisi oktober 2013, hal. 3

<sup>18</sup> Ibid, hal. 4



khususnya Sumatera Selatan. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan pun berinisiatif untuk memotong jalur ekspor ikan patin yang sebelumnya melalui Vietnam, menjadi langsung diekspor ke AS tanpa melalui perantara atau pihak kedua. Budidaya ikan patin di daerah tersebut pun berkembang di berbagai kabupaten atau kota seperti Muaraenim, Ogan Ilir, Banyuasin hingga Palembang. Selain AS, pasar Eropa juga menyediakan peluang ekspor bagi produk ikan patin. Sama halnya dengan AS, penyuplai produk ikan patin terbesar untuk pasar Eropa adalah Vietnam yang menguasai pasar setempat hingga 25%.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem budidaya ikan patin yang terpadu, yang bisa menekan ongkos produksi dan harga jual. Lalu, kualitas produk harus tetap diperhatikan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.

Untuk mencapai visi ini, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan mutu produk ikan patin Indonesia. Dengan luar negeri, misalnya, dengan Vietnam untuk mempelajari bagaimana teknik budidaya yang diterapkan selama ini dalam mengembangkan industri pengolahan ikan patin. Dari segi teknologi, pada dasarnya tidak sulit untuk mempelajari teknologi pengolahan yang telah dipraktikkan oleh pengusaha dan peternak ikan patin di Vietnam. Yang dibutuhkan adalah kesiapan sumber daya manusia di Indonesia yang perlu diberikan melalui kegiatan penyuluhan. Selain kerjasama dengan luar negeri, para pengusaha ikan patin Indonesia juga telah menerapkan berbagai metode sebagai upaya menghasilkan ikan patin dengan kualitas baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

## **Kepentingan Indonesia bekerjasama dengan Vietnam dibidang Perikanan**

### **Mencegah IUU Fishing**

Upaya pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandate pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat

dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*. Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (*preventif*) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal. Sebelum melakukan penangkapan ikan, Pengawas Perikanan di pelabuhan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifasi *transmitter VMS*. Jika hasil verifikasi telah sesuai dengan ketentuan, maka diterbitkan SLO, dan jika tidak sesuai ketentuan maka SLO tidak diterbitkan sampai dilakukan langkah-langkah untuk kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Penerapan HPK dan SLO sebagai instrument pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam melaksanakan operasional penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
2. pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan *transmitter VMS* dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi *transmitter VMS*. Jika terdapat indikasi pelanggaran, maka akan di bawa ke pangkalan/stasiun PSDKP terdekat untuk dilakukan proses hukum;
3. pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan. Verifikasi dilakukan terhadap kapal ikan melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian jenis alat penangkap ikan yang digunakan, serta kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan. Bentuk pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara HPK Kedatangan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan penerapan Buku Lapor Pangkalan yang berfungsi untuk mengetahui kesesuaian kapal berpangkalan dengan pelabuhan pangkalan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIPI

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.50/Men/2012, Hal.21

dan/atau SIKPI, serta untuk mengetahui rata-rata hari operasi kapal. Penerbitan HPK Kedatangan Kapal<sup>20</sup>

Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan menjadi dasar penerbitan SLO berikutnya, bila HPK menunjukkan ketidaksesuaian maka akan dilakukan tindakan sesuai hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengawasan perikanan dapat melibatkan masyarakat. Terkait hal tersebut, KKP telah mengembangkan SISWASMAS (Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat) dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Sampai saat ini telah terbentuk kelompok masyarakat pengawas sebanyak 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) kelompok yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia

Latar belakang terjadinya *illegal fishing* bermacam-macam. Diantaranya industri perikanan Vietnam tanpa pasokan ikan yang cukup akan berhenti, sehingga upaya mencukupi kebutuhan tersebut seringkali dilakukan dengan cara mencuri ikan Indonesia. Menurunnya kuantitas ikan di laut China menyebabkan negara tersebut menerapkan sistem *open and closed sea* bagi nelayannya sehingga mereka mencari ikan ke wilayah negara lain termasuk Indonesia.<sup>21</sup> Sementara, batas wilayah kelautan antara Indonesia dan Malaysia yang belum juga usai menyebabkan seringnya terjadi sengketa perbatasan dan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Tantangan yang dihadapi nelayan di perbatasan Indonesia dan Malaysia kini tidak lagi terbatas pada cuaca ekstrim, namun juga kriminalisasi oleh pihak keamanan asing, akibat batas-batas teritorial yang belum jelas.<sup>22</sup> Masalah batas negara antara RI dan Malaysia seringkali menimbulkan ketegangan di laut antara kedua negara. Seperti yang terjadi dalam penangkapan nelayan Malaysia bulan April 2011 nyaris menimbulkan kontak senjata antara militer kedua negara, maupun penangkapan PNS KKP oleh Tentara Diraja Malaysia beberapa waktu sebelumnya. Sedangkan penangkapan ikan illegal oleh nelayan Vietnam karena perbedaan persepsi antara kedua negara, oleh karena itu dilakukan persamaan persepsi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin dengan *Vietnam Chamber of Commerce and Industry* untuk memahami hukum yang berlaku di kedua negara.

### **Meningkatkan ekspor perikanan Indonesia**

Secara keseluruhan pesaing utama ekspor perikanan Indonesia di Negara importir utama dan dunia dapat menjadi salah satu hambatan tingkat daya saing maupun posisi daya saing produk Indonesia di pasar tertentu. Maka dari itu, menjadi penting untuk melihat

<sup>20</sup> Ibid, hal.22

<sup>21</sup> FGD dengan Ir. Ida Kusuma W, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, tanggal 21 Juli 2011

<sup>22</sup> Wawancara dengan LSM Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Langkat Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2011.

apa saja strategi pesaing utama dalam bidang perikanan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang perikanan Indonesia di tahun mendatang.

Vietnam juga merupakan negara berkembang sama seperti Indonesia, dalam bidang perikanan dapat dikatakan juga Vietnam memiliki garis pantai cukup panjang di sekitar wilayah negaranya. Strategi yang diterapkan dalam perikanan Vietnam adalah menguatkan sektor petani tradisional dahulu. Di Negara ini sedang digencarkan pelaksanaan satu daerah sebagai sentra satu komoditi perikanan. Hal ini bertujuan agar sektor perikanan menjadi salah satu kekuatan dari setiap daerah. Pemerintah Vietnam mencoba menyediakan seluas lahan di suatu daerah untuk mengembangkan satu komoditi perikanan oleh petani tradisional khususnya perikanan budidaya seperti jenis udang. Dari sisi teori ekspor, pertumbuhan ekspor suatu komoditas salah satunya dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dimana bila terjadi depresiasi akan meningkatkan ekspor suatu negara.

Di sektor perikanan, negara Indonesia kalah ketimbang Vietnam khususnya ikan patin. Bahkan Indonesia juga masih menggantungkan impor ikan patin dan produk olahan ikan patin dari Vietnam. Padahal dulu Vietnam pernah belajar budidaya ikan patin dari Indonesia. Hal ini diakui kebenarannya oleh Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan produksi ikan patin di Vietnam jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi Indonesia. Hal ini karena teknik budidaya ikan patin di Vietnam sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan untuk harga, ikan patin Vietnam jauh lebih murah. "Vietnam bisa produksi ikan patin itu sekitar 350 ton/hektare kalau kita cuma 70 ton/hektare. harga ikan patin Vietnam sampai ke Indonesia itu Rp 28.000/kg, dan ikan patin Indonesia harganya Rp 33.000-36.000/kg.". Kebutuhan ikan patin Indonesia sebesar 700 ton/bulan. Sedangkan hanya 100-120 ton yang bisa diproduksi di dalam negeri sisanya impor.<sup>23</sup>

### **Tekan Impor**

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti di perhotelan dan restoran dari patin kualitas super yang mencapai kurang lebih 100 ton per bulan, beberapa tahun yang lalu kebutuhan ini dicukupi melalui impor dari Vietnam. Kendala utama dalam produksi patin dalam negeri adalah faktor penguasaan teknologi, karakteristik sumber daya alam dan efisiensi produksi yang rendah. Untuk mengatasi kendala ini KKP melakukan upaya

---

<sup>23</sup> "Indonesia Disalip Vietnam di 3 Sektor", Diakses dari : <http://ikanbijak.wordpress.com/2009/03/14/>, diakses tanggal 15 Oktober 2009

penelitian dan pengembangan teknologi budidaya dan pasca panen agar mutu patin lokal dapat memiliki kualitas yang sama dengan patin Impor. “Patin asal Vietnam dengan kualitas bagus dan murah menjadi ancaman serius bagi patin lokal. Apabila impor patin terus-menerus dibiarkan, patin lokal akan tidak memiliki daya saing. Untuk itu, KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2011, telah melakukan pengendalian terhadap impor produk fillet patin.

Kebijakan ini juga akan mendorong para pelaku usaha untuk semakin meningkatkan produksi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di masa mendatang bila memungkinkan hasil produksi patin juga akan dieskpor. Kebutuhan patin yang sangat besar untuk pasar domestik harus dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong dan memacu para pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi patin dengan target produksi tahun 2013 sebesar 1.107.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan dalam negeri, Indonesia tidak boleh tergantung impor. Dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada, sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan ikan untuk bahan baku industri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri produksi perikanan juga ditujukan untuk peningkatan ekspor. “Khusus pengembangan industri kelautan dan perikanan, salah satu aspek penting yang diperhatikan saat ini adalah ketersediaan bahan baku ikan yang cukup untuk industri pengolahan, terutama berada di wilayah barat. Sementara produksi ikan banyak berada di wilayah Indonesia bagian Timur. KKP saat ini sedang mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membenahi distribusi, memastikan ketersediaan ikan yang cukup dan menciptakan harga ikan yang relatif stabil sepanjang tahun di tanah air.

## **Simpulan**

Indonesia merupakan negara yang kaya sumberdaya kelautan dan perikanan. Indonesia secara geografis Indonesia dan Vietnam terletak berdekatan sehingga terjalinnya kerjasama di bidang perikanan. Perikanan merupakan suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan. Prospek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Walaupun data yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia memiliki potensi perikanan yang menjanjikan, namun pemanfaatannya masih kurang maksimal. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat dengan sepuluh negara asia tenggara, terutama Vietnam. Vietnam yang merupakan salah satu dari sepuluh eksportir produk perikanan di dunia, sehingga Indonesia ingin bekerjasama terutama di bidang perikanan dengan Vietnam sehingga Indonesia dapat belajar teknik perikanan Vietnam.

Kepentingan Indonesia dalam kerjasama perikanan ini di antaranya ingin mencegah terjadinya illegal fishing di kedua negara, yang dapat merugikan. Selain ingin

mencegah illegal fishing Indonesia juga ingin meningkatkan ekspor perikanan. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.

### **Daftar Pustaka**

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009, Jakarta, 2005, hlm 23.

FGD dengan Ir. Ida Kusuma W, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, tanggal 21 Juli 2011

K. Romimohtarto, “Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia”, Makalah Seminar Hukum Nasional V, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1990, hlm 2-3.

Rokhmin Dahuri, “Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan”, Makalah, disampaikan pada Seminar Kuliah Umum Institut Pertanian Bogor, tanpa tahun, hlm.12.

Kementrian Perdagangan, Warta Ekspor, edisi oktober 2013, hal. 3

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.50/Men/2012, Hal.21

Wawancara dengan LSM Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Langkat Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2011.

“Illegal fishing, kejahatan tradisonal yang terlupakan”, dikutip dari: <http://www.p2sdkpkendari.com>, pada tanggal 22 Maret 2013

“Potret-negara-maritim-indonesia-menuju-pembangunan-industri-laut” Dikutip dari.<http://penanusantara.com>. 12 Maret 2013

Indonesia, Vietnam Sepakati Aturan Investasi dan Kerjasama Maritim”, dikutip dari: <http://m.voaindonesia.com/>.html, tanggal 20 Juni 2013

“Illegal Fishing, Kejahatan Tradisional yang terlupakan “ <http://www.depghan.go.id>, diakses pada hari sabtu, 22 Maret 2008

RI-Vietnam Fokuskan Kerjasama Perikanan dan Perdagangan, Diakses dari: [www.KemenluRI.go.id](http://www.KemenluRI.go.id), tanggal 25 Oktober 2013

“Indonesia, Vietnam sepakati aturan kerjasama maritime”  
<http://m.voaindonesia.com/a/98189.html>, tanggal 13 Maret 2013

“Indonesia, Vietnam sepakati aturan kerjasama maritime”  
<http://m.voaindonesia.com/a/98189.html>, tanggal 13 Maret 2013

“Indonesia Disalip Vietnam di 3 Sektor”, Diakses dari :  
<http://ikanbijak.wordpress.com/2009/03/14/>, diakses tanggal 15 Oktober 2009

“Keadaan Geografi Indonesia”. Diakses dari: <http://www.demografiIndonesia.html>. Pada tanggal 18 Juni 2010.

“Letak geografi RI-Vietnam”. Diunduh dari situs <http://www.demografi.go.id>, tanggal 29 Desember 2012

“pertanian-perikanan “, Dikutip dari: <http://www.informasi-vietnam.com/html>, tanggal 12 Juni 2013

“ Potensi-lautan-indonesia”, Diakses dari [http// www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), Tanggal 11 Juni 2013